

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. PERAN PEMUDA DAN MAHASISWA**

Pemuda merupakan generasi suatu bangsa yang mana memiliki peran penting dalam membawa kemajuan suatu bangsa. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 40 tahun 2009 dijelaskan bahwa pemuda merupakan seorang warga negara indonesia yang termasuk kedalam periode penting pertumbuhan dan memiliki perkembangan usia antara 16 sampai 30 tahun.<sup>7</sup> Artinya seseorang yang kurang dari 16 tahun atau yang lebih dari 40 tahun, tidak termasuk kedalam definisi seorang pemuda. Hal tersebut menandakan bahwasannya seorang pemuda sebagai warga negara indonesia sedang memasuki fase pertumbuhan yang sangat penting dalam suatu kehidupan manusia.

Fase pertumbuhan inilah yang membuat pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa indonesia. Ide, gagasan, serta gerakan pemuda harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah selaku pemangku kebijakan. Pemuda harus diberikan wadah serta regulasi untuk terus mengembangkan ide dan gagasannya untuk turut serta dalam pembangunan suatu bangsa.

Pemerintah memberikan regulasi khusus untuk memberdayakan dan mengembangkan pemuda yaitu dalam undang – undang nomor 40 Tahun

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1

2009 tentang kepemudaan. Dalam undang–undang tersebut juga dibahas mengenai pelayanan kepemudaan, tugas wewenang dan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan pemuda, serta peran, tanggungjawab dan hak pemuda.

Peran pemuda sebagai kontrol sosial diatur dalam pasal 17 undang–undang nomor 40 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya pemuda memiliki peran sebagai kontrol sosial dalam bentuk

- a. Memperkuat wawasan kebangsaan
- b. Membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban warga negara
- c. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum
- d. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik
- e. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik dan / atau
- f. Memberikan kemudahan akses informasi

Berdasarkan pasal 17 undang – undang nomor 40 Tahun 2009 tersebut, pemerintah memberikan dukungan kepada pemuda untuk turut serta berperan sebagai kontrol sosial dalam masyarakat. Keterlibatan pemuda sebagai kontrol sosial dalam masyarakat tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional untuk kemajuan suatu bangsa.

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah meratanya pendidikan serta kemudahan akses pendidikan. Dalam tingkatan pemuda

pendidikan yang sangat potensial untuk mengembangkan ide, gagasan, serta gerakannya adalah pada tingkat perguruan tinggi atau dalam hal ini, ketika seseorang pemuda menjadi seorang mahasiswa.

Mahasiswa dapat mengembangkan ide, gagasan serta gerakan melalui berbagai fasilitas yang ada diperguruan tinggi, yaitu melalui berbagai organisasi intrakampus atau organisasi dibawah naungan kampus maupun organisasi ekstra kampus atau organisasi mahasiswa yang berada diluar kampus. Sejarah mencatat bahwasannya mahasiswa yang tergabung dalam intra kampus dan ekstra kampus memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama pada saat transisi era orde baru menuju era reformasi.

Beberapa momentum penting yang melibatkan organisasi mahasiswa intra kampus dan ekstra kampus selama masa transisi dari pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi antara lain: Tragedi Trisakti di Jakarta yang diikuti Peristiwa Gejayan Yogyakarta, serta meningkatnya suhu politik yang ditandai dengan aksi penjarahan di Jakarta dan daerah lain, aksi mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR, sampai akhirnya memaksa presiden Suharto mengundurkan diri dan mengangkat B.J Habibie selaku WakilPresiden menjadi Presiden.

Tragedi Trisakti bermula dari kegiatan unjuk rasa mahasiswa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Denpasar kemudian bersama empat organisasi mahasiswa lainnya mengajukan usulan penyelenggaraan Sidang Umum MPR kedua. Sampai akhirnya, pada 12 Mei 1998 demonstrasi besar-

besaran terjadi di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memakan enam korban jiwa dari kalangan mahasiswa, yaitu Elang Mulya Lesmana, Hery Hertanto, Hendirawan Lesmana, dan Hafi dhin Royan.<sup>8</sup>

Dari berbagai momentum penting diatas, dapat dilihat bahwasannya pemuda terkhusus pemuda yang sekaligus menjadi mahasiswa memiliki peran yang sangat penting sebagai *Social Control* atau kontrol sosial dan *Agen of Change* atau pembawa perubahan dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah.

Mahasiswa merupakan kelompok yang dalam struktur sosial masyarakat berada dalam kelas menengah. Mereka mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat kelas bawah dan memiliki kemudahan akses serta kemungkinan mobilitas vertikal ke kelompok atas. Oleh karena itulah mahasiswa seringkali dianggap sebaga jembatan nurani masyarakat banyak yang mampu mewakili aspirasi masyarakat. Mahasiswa sebagai pemuda terdidik merupakan warisan termahal milik bangsa ini. Dengan segala kemudaannya, mahasiswa berada dalam puncak kekuatan manusia dalam berbagai aspek potensinya, yaitu:

1. Potensi spiritual Ketika meyakini sesuatu, seorang pemuda dan mahasiswa sejati akan memberi secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih. Mereka berjuang dengan sepenuh hati dan jiwa.
2. Potensi intelektual Seorang pemuda dan mahasiswa sejati berada dalam puncak kekuatan intelektualnya. Daya analisis yang kuat

---

<sup>8</sup> Yetti Pudiyanti, *Langkah tegap pemuda*, ( Jakarta: kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2020) hlm.27

didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisannya mereka berbasis intelektual karena didukung pisau analisis yang tajam.

3. Potensi emosional Keberanian dan semangat yang senantiasa bertalutalut dalam dada berjumpa dengan jiwa muda sang mahasiswa. Kemauan yang keras dan senantiasa menggelora dalam dirinya mampu menular ke dalam jiwa bangsanya. Maka, jangan heran mereka pun seringkali menantang arus zaman dan mampu membelokkan arah sejarah sebuah bangsa.
4. Potensi fisik Secara fisik pun mereka berada dalam puncak kekuatan dan diantara dua kelemahan. Kelemahan pertama adalah kelemahan ketika bayi yang tak berdaya. Kelemahan kedua adalah ketika tua (pikun). Mahasiswa sejati berlepas diri dari dua kelemahan tersebut

Perpaduan keempat potensi yang dimiliki mahasiswa di atas, menjadikan mahasiswa dan gerakan yang dibangunnya senantiasa diperhitungkan dalam keputusan-keputusan besar sebuah bangsa.<sup>9</sup> Maka dari itu mahasiswa harus senantiasa melakukan gerakan-gerakan yang menyesuaikan zaman dan gerakan-gerakan yang berorientasi kepada kemaslahatan bersama.

## **B. PERAN DAN FUNGSI PERGERAKAN MAHASISWA**

Pergerakan mahasiswa diperhitungkan dalam setiap keputusan-keputusan besar suatu bangsa karena pergerakan mahasiswa memiliki peran

---

<sup>9</sup> Indra Kusumah, "*Risalah pergerakan mahasiswa*", (Bandung: Indydec Press, 2007), hal.

dan fungsi yang sangat penting dalam mengawal setiap kebijakan yang ada dalam sebuah negara. Peran pergerakan mahasiswa diantaranya yaitu :

1. Sebagai pelebagaan peran perubahan sosial (*agent of social change*).
2. Sebagai pelebagaan peran cadangan masa depan dalam bentuk pendidikan politik bagi aktifis pergerakan mahasiswa.
3. Sebagai pelebagaan peran penyebaran *fikrah* (pemikiran) politik keadilan.

Selain peran, pergerakan mahasiswa juga memiliki fungsi yang sangat penting, fungsi pergerakan mahasiswa antara lain :

1. Menjaga kelangsungan regenerasi kepemimpinan politik pergerakan mahasiswa.
2. Merumuskan Wacana Pergerakan Mahasiswa.
3. Melakukan komunikasi politik yang intensif dengan Konstituen Pergerakan Mahasiswa.
4. Membina Konstituen Pergerakan Mahasiswa.
5. Melakukan pendidikan politik yang didasarkan pada ideologi ('*aqidah*), etika politik (akhlaq siyasi), pemikiran politik (fikrah siyasi) dan perilaku organisasi (suluk tandzim)<sup>10</sup>

### C. PRINSIP PERGERAKAN MAHASISWA

Dalam melakukan sebuah pergerakan, tentunya terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa. Prinsip-prinsip pergerakan yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa diantaranya yaitu :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 34-35

1. Menjadikan ideologi ('aqidah), pemikiran (fikroh) dan konsep serta pola gerakan (minhaj haraki) sebagai pengarah dan sumber petunjuk.
2. Membingkai kerja dengan perilaku (suluk) dan etika (akhlaq) yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.
3. Memegang teguh konsep perjuangan: memberi teladan sebelum mengajak, mengembirakan bukan menakuti, mempermudah bukan mempersulit, serta memberi solusi bukan menghakimi.
4. Melakukan aktifitas pergerakan yang intelektual dan inklusif, serta menjauhi kerja yang anarkis, eksklusif dan khusus untuk golongan tertentu.
5. Mengelola lembaga pergerakan mahasiswa dengan mengacu kepada prinsip Legal, Formal dan Wajar.
6. Mengingat hakikat dirinya sebagai aktifis pergerakan yang memiliki tugas mengajak orang untuk terlibat dalam proses kaderisasi gerakan melalui berbagai potensi yang dimiliki.
7. Menyemangati diri dan aktifis yang lain untuk terus berkontribusi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.
8. Melakukan upaya yang terus-menerus untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penemuan ilmiah dan pemikiran solutif.
9. Memperhatikan secara khusus orang-orang yang cerdas, berprestasi dan kreatif untuk diajak sinergi dalam pergerakan.
10. Menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan seorang sivitas akademika lulusan perguruan tinggi di hadapan masyarakat adalah berdasar pada

kompetensi ilmu, keterampilan, moral dan interaksi sosialnya. Karenanya tidak ada keringanan dan pengecualian dalam pencapaian hal tersebut.

11. Mengantisipasi kondisi dan kebutuhan dunia pasca kampus.
12. Memiliki peran besar dalam isu kemanusiaan, kebangsaan dan keumatan.
13. Membela hak asasi manusia, kemerdekaan dan keadilan bagi manusia, bangsa dan umat.
14. Melakukan interaksi dan hubungan baik dengan semua golongan dalam batas adab umum yang berlaku dan prinsip persaudaraan serta kemanusiaan yang luas.
15. Memahami dan memanfaatkan logika dan adab umum sivitas akademika serta peraturan formal keorganisasian sivitas akademika yang berlaku.
16. Memandang penting keikutsertaan dalam media mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.<sup>11</sup>

#### **D. HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

Sejarah lahirnya Himpunan mahasiswa Islam (HMI) tidak dapat terlepas dari peran tokoh pahlawan nasional yaitu Lafran Pane sebagai seorang yang menginisiasi berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam. HMI berdiri pada hari Rabu Pon, 14 Rabi'ulawal 1366 H atau tepatnya pada tanggal 5 februari 1947 M pukul 16.00 WIB. Lafran Pane mendeklarasikan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm.31



berdirinya himpunan mahasiswa islam dengan memanfaatkan jam perkuliahan seorang dosen yang bernama Prof. Husain Yahya. Lafran Pane mendeklarasikan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dihadapan 20 mahasiswa lainnya diantaranya kartono, Dahlan husein, Anton Timur Djaelani, Yusdi Ghozali dan lainnya.

Deklarasi berdirinya organisasi himpunan mahasiswa islam, bertempat disalah satu ruang kuliah di kampus Sekolah Tinggi Islam (STI) yang sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), dijalan Setyodiningratan 30 yang sekarang P. Senopati 30. Berawal dari tempat itulah HMI berdiri, sejak berdirinya HMI mengidentifikasikan sebagai organisasi yang independen, hal ini berarti organisasi HMI tidak berafiliasi dengan partai politik maupun dengan organisasi masyarakat lainnya.

Tujuan awal berdirinya organisasi himpunan mahasiswa islam yaitu :

1. Mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia
2. Menegakkan dan mengembangkan agama islam

Seiring berjalannya waktu tujuan HMI mengalami perkembangan yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah Subhanahu Wata'ala". Selain hal-hal tersebut ada beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya organisasi himpunan mahasiswa islam, faktor tersebut yaitu :

1. Kondisi kebangsaan sendiri yang terbagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal, internal ditandai dengan kehadiran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dengan terang-terangan ingin mengganti ideologi pancasila menjadi ideologi komunis, sedangkan eksternal ditandai dengan ancaman dan agresi militer belanda II pada kisaran tahun 1948
2. pergolakan umat islam di tanah air juga menjadi tanda kelahiran HMI dimana pada fase tersebut tepat pasca kemerdekaan Republik Indonesia organisasi bernafaskan Islam muncul dengan kepentingan yang berbeda-beda, terutama golongan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang berselisih paham. Oleh karena itu, masyarakat menjadi bingung memilih aliran yang paling tepat
3. situasi kampus dan kemahasiswaan di Indonesia khususnya di Yogyakarta ditandai dengan menyebarnya virus- virus sosialisme dan komunisme dikalangan masyarakat dan mahasiswa.<sup>12</sup>

#### **E. TEORI KONTROL SOSIAL**

Travis Hirschi merupakan seorang pemikir sosiologis yang berasal dari Amerika. Ia mengembangkan sebuah teori yaitu *Social Bond Theory* atau yang lebih dikenal di indonesia dengan teori kontrol sosial. Travis Hirschi mengajukan beberapa proposisi mengenai teori kontrol sosialnya, proposisi tersebut yaitu :

---

<sup>12</sup> Andi Hasdiansyah, “Peran Kader Himpunan Mahasiswa Islam dalam membangun tradisi ilmiah didalam kampus (Studi peran kader Himpunan Mahasiswa Islam di Universitas Makasar), Vol. 2, No. 2, Hlm. 136.

1. Berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan – aturan sosial merupakan akibat dari gagalnya mensosialisasi individu untuk bertindak sesuai aturan atau tata tertib yang berlaku.
2. Suatu penyimpangan bahkan kriminalitas, merupakan suatu bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu untuk bertindak sesuai aturan sosial yang berlaku, kelompok sosial ini seperti : keluarga, institusi pendidikan, maupun kelompok dominan lain yang ada dalam suatu masyarakat.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk bertindak sesuai aturan – aturan yang ada dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan yang ada.
4. Kontrol internal memiliki pengaruh lebih dari pada kontrol eksternal.<sup>13</sup>

Teori-teori kontrol sosial juga merupakan suatu teori yang membahas terkait isu-isu bagaimana masyarakat dapat memelihara atau menumbuhkan kontrol sosial dan bagaimana cara memperoleh kesesuaian antara tindakan dengan aturan yang berlaku. Teori kontrol sosial ini melihat sebab kejahatan adalah pada lemahnya ikatan individu dengan masyarakat atau bisa dikatakan terjadinya kemacetan integrasi sosial. Suatu individu atau kelompok yang ikatan sosialnya lemah akan lebih berpotensi melakukan pelanggaran hukum karena rasa keterikatan dengan peraturan yang ada sangatlah lemah.

---

<sup>13</sup> Yusra Mahdalena Dan Bukhari Yusuf, “ *Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus Di Gampong Ujung Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar)* “ Jurnal Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 2, Nomor 2, Mei 2017, Hal. 721

Teori kontrol sosial juga berawal dari anggapan atau asumsi bahwasannya setiap individu kecenderungan kemungkinan yang sama, yaitu menjadi baik atau jahat. Dalam hal ini kondisi lingkungan masyarakat tentunya juga sangat berpengaruh. Apa bila masyarakatnya baik, akan membawa pengaruh kepada setiap individu untuk berbuat baik atau ada dorongan bagi individu untuk melakukan suatu kebaikan.

Travis Hirschi juga menampilkan teori ikatan sosial dalam *Causes of Delinquency* yang mana pada dasarnya menyatakan bahwa suatu kejahatan terjadi ketika ikatan seseorang dengan kelompok atau masyarakat melemah.<sup>14</sup> Semakin lemahnya ikatan individu dengan masyarakat maka tingkat konformitas atau ketaatan seseorang terhadap aturan juga akan semakin lemah. Seorang individu akan mempertahankan konformitas karena merasa khawatir pelanggaran yang dilakukan akan merusak hubungan mereka dengan keluarga, tetangga, teman, sekolah, pekerjaan dan sebagainya. Intinya, seorang individu mempertahankan konformitas bukan takut pada suatu hukuman, tetapi lebih kepada kesadaran hidup bermasyarakat dan pelanggaran yang akan dilakukan akan berdampak pada rusaknya citra diri seorang individu.

Kontrol sosial juga mempunyai sifat-sifat yang beragam, berdasarkan sifatnya kontrol sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengendalian sosial preventif dan pengendalian sosial represif

---

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 728

**a) Kontrol Sosial Preventif**

Kontrol sosial preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib sebelum terjadinya penyimpangan sosial. Preventif tersebut termasuk kontrol sosial, atau tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Pada umumnya kontrol sosial preventif ini dilakukan dengan ajakan, bimbingan dan pengarahan.<sup>15</sup>

Kontrol sosial preventif masyarakat atau seseorang biasanya dilakukan dengan mengajak, membujuk, mengarahkan dan mengingatkan supaya masyarakat atau seseorang tersebut mentaati peraturan yang telah berlaku. Kontrol sosial preventif lebih menghemat biaya untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dibandingkan dengan mengurangi dampak dari pelanggaran sosial.

Beberapa contoh tindakan kontrol sosial untuk mencegah suatu pelanggaran sebagai berikut

1. Badan Narkotika Nasional ( BNN ) melakukan sosialisasi kepada pemuda tentang bahaya akibat penyalahgunaan narkotika. Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika agar terciptanya masyarakat yang terbebas dari narkoba serta untuk terciptanya suasana kondusif pada masyarakat.

---

<sup>15</sup> Ida Bagus Sudarma Putra, “ *Social Control :Sifat Dan Sanksi Sebagai Kontrol Sosial* “ Vyavaharaduta, Volume XIII, No.1, Maret 2018, Hal. 29

2. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang diberikan pada sekolah dan universitas agar para siswa dan mahasiswa tidak terjerumus pada pelanggaran hukum dan tidak melakukan makar.
3. Polisi lalu lintas yang berjaga - jaga pada setiap perempatan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwewenang, untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap aturan yang berlaku guna terciptanya suasana kondusif dimasyarakat.

#### **b) Kontrol Sosial Represif**

Represif menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki 2 arti penting yaitu bersifat represi (menekan, mengekang, menahan atau menindas) dan bersifat menyembuhkan. Dari 2 arti penting tersebut dapat diartikan bahwa represif adalah tindakan yang menekan, menahan, atau mengekang bagi masyarakat atau perseorangan yang melakukan suatu pelanggaran dan bisa juga bersifat menyembuhkan atau memperbaiki mereka yang melakukan suatu pelanggaran.

Tindakan represif menurut situs Globespotes merupakan tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak yang berwajib pada saat terjadinya pelanggaran sosial agar penyimpangan sosial yang sedang terjadi dapat dihentikan. Tindakan represif ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan suasana kondusif pada masyarakat yang pernah terganggu akibat penyimpangan sosial atau akibat pelanggaran

terhadap aturan yang berlaku dengan cara menjatuhkan sanksi yang dilakukan oleh pelanggar aturan.<sup>16</sup>

Tujuan kontrol sosial represif yaitu mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran dijatuhkan agar para pelaku pelanggaran tidak melakukan suatu kesalahan yang sama. Contoh dari kontrol sosial represif yaitu:

- 1) Polisi membubarkan balap liar yang dilakukan oleh para pemuda dan para pemuda yang terjaring dalam razia diberi sanksi oleh petugas kepolisian.
- 2) Seorang guru memberi sanksi kepada siswa yang terlambat masuk kelas
- 3) Seorang pengedar narkoba ditangkap dan diberi sanksi oleh pihak yang berwenang

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial represif merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap pelaku pelanggaran dengan memberikan sanksi dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama pada kemudian hari.

---

<sup>16</sup> Ida Bagus Sudarma Putra, “ *Social Control :Sifat Dan Sanksi Sebagai Kontrol Sosial* “ Vyavaharaduta, Volume XIII, No.1, Maret 2018, Hal. 30

## F. PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari cita – cita suatu bangsa, hal ini dapat diartikan juga sebagai suatu usaha dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam konstitusi yakni kesejahteraan rakyatnya. Dalam buku yang berjudul “pendidikan untuk pembangunan nasional”, definisi pembangunan nasional yaitu upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjadikan bangsa indonesia sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju, baik dalam taraf hidup maupun dalam berbagai bidang dan berbagai aspek kehidupannya.<sup>17</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik benang merah atau sebuah kesimpulan bahwasannya pembangunan nasional Indonesia harus dapat mencapai kemajuan di Indonesia sendiri, yang mana kemajuan hasil dari pembangunan nasional itu, bukan hanya pada aspek ekonomi, melainkan juga pada berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, seperti pendidikan, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Penyelenggaraan pembangunan sendiri, tentunya memerlukan sebuah perencanaan. Perencanaan dalam pembangunan nasional di Indonesia dilakukan agar pembangunan nasional itu sendiri lebih terarah dan terukur. Dengan adanya suatu perencanaan, kegiatan – kegiatan pembangunan nasional lebih terarah kepada suatu tujuan yang jelas dan diharapkan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional.

---

<sup>17</sup> Mohammad Ali, “ *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional : Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi* “, (Jakarta: Grasindo, 2009) Hlm. 43



Pembangunan nasional juga sebagai suatu cerminan kehendak untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia, pembangunan nasional harus dilakukan secara adil dan merata untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkembang berdasarkan pancasila.

Pembangunan nasional ini harus selaras dengan tujuan bangsa indonesia yang terdapat dalam pembukaan dan juga batang tubuh Undang-undang 1945, yang pada intinya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik dalam segi material dan juga spiritual berdasarkan pancasila didalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, besatu, dan berdaulat. Oleh karenanya, pembangunan nasional menjadi sangat penting bagi suatu negara.

Pembangunan nasional di Indonesia diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat SPNN. Pembangunan nasional dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang SPNN lebih jelasnya pada pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>18</sup> Hal ini berarti, pembangunan nasional menjadi tanggungjawab bersama, tidak hanya menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara (pemerintah), melainkan masyarakat juga harus turut andil dalam pelaksanaan pembangunan nasional ini, hal ini agar tercapainya tujuan bernegara. Mencapai tujuan bernegara berarti juga mencapai tujuan seluruh masyarakat dalam sebuah bangsa.

---

<sup>18</sup> Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan : Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan", Pasca Sarjana Universitas Katholik Parahyangan, Hlm.103

Salah satu contoh mencapai tujuan bernegara adalah adanya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.

Salah satu upaya dalam mencapai pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang memiliki jangka panjang atau pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar pembangunan nasional memiliki konsepsi pembangunan yang tidak hanya untuk kesejahteraan sementara, melainkan agar bertujuan untuk kesejahteraan saat ini dan juga kesejahteraan dimasa mendatang.

Menurut Mohammad Ali, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses pemenuhan kebutuhan manusia sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan manusia dimasa mendatang.<sup>19</sup> Agar tercapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan pemenuhan salah satu syarat pembangunan yang berkelanjutan, syarat tersebut yaitu penjaminan adanya kesempatan yang merata serta adil bagi semua orang. Pembangunan nasional juga merupakan suatu proses perubahan yang didalamnya meliputi, seluruh aktivitas eksplorasi sumberdaya, orientasi pengembangan teknologi, arah investasi, dan perubahan kelembagaan berada dalam kondisi yang selaras serta peningkatan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia.

---

<sup>19</sup> Mohammad Ali, “ *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional : Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi* “, Jakarta: Grasindo, 2009, Hlm. 43

Prinsip pembangunan berkelanjutan sendiri dihasilkan dengan memperhatikan 3 aksioma yaitu :

- a. Memberlakukan masa kini dan masa mendatang yang mana menempatkan nilai positif dalam jangka panjang.
- b. Menyadari bahwa aset lingkungan akan memberikan kontribusi besar pada kesejahteraan dimasa ini dan dimasa mendatang.
- c. Mengetahui kendala akibat dampak yang timbul pada kerusakan aset lingkungan

Pembangunan berkelanjutan juga sering diartikan sebagai perbaikan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan dukungan kapasitas lingkungan ( *carrying capacity* ). Pembangunan di Indonesia, dapat dinilai dengan beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur pembangunan. Secara makro, capaian pembangunan ekonomi dan sosial dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan manusia sendiri merupakan gabungan antara 3 indikator yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator daya beli.<sup>20</sup>

Indikator kesehatan dan indikator pendidikan merupakan indikator dimensi sosial, sedangkan indikator daya beli merupakan indikator ekonomi. Dalam ranah pembangunan lingkungan yang dapat dijadikan indikator capaian pembangunannya adalah kualitas lingkungan hidup.

---

<sup>20</sup> *Ibid, Hlm.104*

Apabila indikator- indikator tersebut digabungkan, maka akan menjadi indikator pembangunan berkelanjutan yang komprehensif, baik dari sudut pandang sosial, ekonomi maupun lingkungan. Dengan tercapainya indikator pembangunan berkelanjutan yang komprehensif maka akan tercapai pembangunan yang baik pula, baik dari sisi keadaan, cakupan spasial, maupun relevansi dengan fenomena yang diukur.

Selain indikator-indikator diatas ada satu indikator lagi yang tak kalah penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu good governance atau yang sering dikenal dengan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dikatakan pemerintahan yang jujur, bersih dan berintegritas. Indikator daya beli, kesehatan dan indikator pendidikan apabila tidak ditunjang dengan pemerintahan yang baik, maka akan sulit untuk diwujudkan. Dalam hal mewujudkan kesejahteraan, maka pemerintahan yang baik akan membuat regulasi atau kebijakan – kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama, demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

#### **G. PENELITIAN TERDAHULULU**

Dalam melakukan suatu penelitian tentu harus memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari pengulangan penelitian. Untuk menghindari pengulangan penelitian yang ini, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan peneliti, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan,

terkhusus penelitian tentang organisasi himpunan mahasiswa islam, beberapa penelitian tersebut diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Dandung Arifridho pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh organisasi kepemudaan HMI terhadap partisipasi politik anggota HMI di Bandar Lampung” . penelitian ini berisi tentang bagaimana pengaruh organisasi kepemudaan HMI terhadap partisipasi politik anggota HMI di Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah HMI adalah suatu organisasi perkaderan yang mampu membentuk suatu kader yang memiliki kompeten dalam dunia perpolitikan dan juga mengajarkan kepada setiap kadernya untuk turut aktif berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Partisipasi aktif yang dilakukan HMI Bandar Lampung dalam rangka kesadaran akan pentingnya peran pemuda dalam hal perpolitikan, meski tingkat partisipasi HMI Bandar Lampung dalam kategori sedang.<sup>21</sup> Perkaderan yang dilakukan oleh HMI khususnya pada HMI Bandar Lampung menjadi suatu wadah untuk membentuk kader-kader yang memiliki karakter, kepribadian, watak, pola berfikir kritis dan lebih berani dalam mengungkapkan suatu pendapat sebagai modal para kader untuk menjadi pemimpin yang memiliki semangat keislaman dan keindonesiaan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah dari segi fokus penelitiannya, selain itu penelitian yang akan dilakukan ini, juga lebih

---

<sup>21</sup> Dandung Arifridho, Skripsi “ *Pengaruh Organisasi Kepemudaan HMI Terhadap Partisipasi Politik Anggota HMI Di Bandar Lampung* “ (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2017) Hal. 83

mengarah kepada konteks yang lebih luas yaitu pembangunan nasional. Objek kedua penelitiannya pun juga berbeda Cabang HMI yang diteliti.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putra saptian pratama pada tahun 2018 dengan judul “ Budaya organisasi himpunan mahasiswa islam dan unit kegiatan mahasiswa islam di fisip USU ”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana budaya organisasi himpunan mahasiswa islam dan unit kegiatan mahasiswa islam di fakultas sosial dan ilmu politik universitas sumatra utara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Putra saptian Pratama ini adalah organisasi sesuai dengan jati diri dan identitas mahasiswa baik agama, suku bangsa, dan asal daerah. Organisasi yang cenderung sesama golongan sesungguhnya di dasarkan atas sentimen-sentimen sesama yang di miliki mereka.

Organisasi terbentuk karena manusia senantiasa tidak bisa hidup sendiri, organisasi akan mencari dan mahasiswa akan menempatkan identitasnya dengan cara berinteraksi. Hal ini sesuai dengan teori Aristoteles tentang teori *Zoon Politicon* bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yang tidak pernah lepas dari masyarakat, karena sejak manusia lahir pasti sudah memiliki keterkaitan dengan masyarakat.

Akibatnya, sifat kodrati manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain sehingga manusia membentuk sebuah organisasi. Manusia berorganisasi itu karena kesadaran akan kepentingan bersama yang nantinya akan mengadakan kerjasama dengan semua pihak dalam mencapai tujuan, meskipun dalam banyak hal kehidupan masyarakat

kita mengetahui ada kepentingan manusia yang tidak sama bahkan saling bertentangan.

Kelompok atau organisasi tidak akan terwujud jika tidak adanya interaksi sosial. Mahasiswa dalam suatu pengelompokan harus berinteraksi terlebih dahulu agar mengenal satu sama lain. dengan berinteraksi akan menjalin hubungan satu sama lain dan akhirnya membentuk suatu kelompok.

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan-hubungan antara orang-perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Interaksi adalah kunci dari terbentuknya suatu kelompok atau organisasi. Untuk melakukan perekrutan, terlebih dahulu adanya pendekatan antar mahasiswa yang satu dengan yang lain. Keberagaman organisasi yang ada di FISIP USU tidak menimbulkan konflik meskipun di dalamnya terdapat berbagai wadah organisasi yang berbeda baik secara agama, suku, dan budaya.

Organisasi senantiasa menjadi warna tersendiri bagi kampus karena adanya keberagaman tersebut. Keberagaman juga dapat menambah pengetahuan dengan lebih mengenal organisasi lain yang berbeda dengan

organisasi sendiri.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Eka Febriyani pada 2019 dengan judul “ Peran Himpunan Mahasiswa Islam Dalam Peningkatan Kesadaran Berpolitik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana peran himpunan mahasiswa islam dalam peningkatan kesadaran berpolitik pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Febri Ekayani ini adalah HMI sebagai salah satu organisasi yang bersifat eksternal yang dimana artinya HMI bukan merupakan bagian dari struktual dalam lingkup kampus seperti UKM, yang ada didalam lingkup kampus. Tetapi keberadaan HMI telah diakui dan tersebar diseluruh kampus yang ada di Indonesia.

Organisasi HMI itu sendiri tidak sepenuhnya tertuju hanya didalam lingkup kampus, tetapi HMI itu sendiri lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan diluar lingkup kampus itu sendiri. Jikapun ada kader-kader HMI yang melakukan kegiatan didalam lingkup kampus itu sifatnya atas nama pribadi seperti atas nama HMJ bukan atas nama organisasi HMI.

Peran yang dilakukan HMI dalam meningkatkan kesadaran politik mahasiswa yaitu dengan memberikan ruang bagi para mahasiswa yang menjadi anggota atau kader ikut peran aktif dalam setiap kegiatan yang bersinggungan dengan dunia politik sehingga para mahasiswa yang menjadi

---

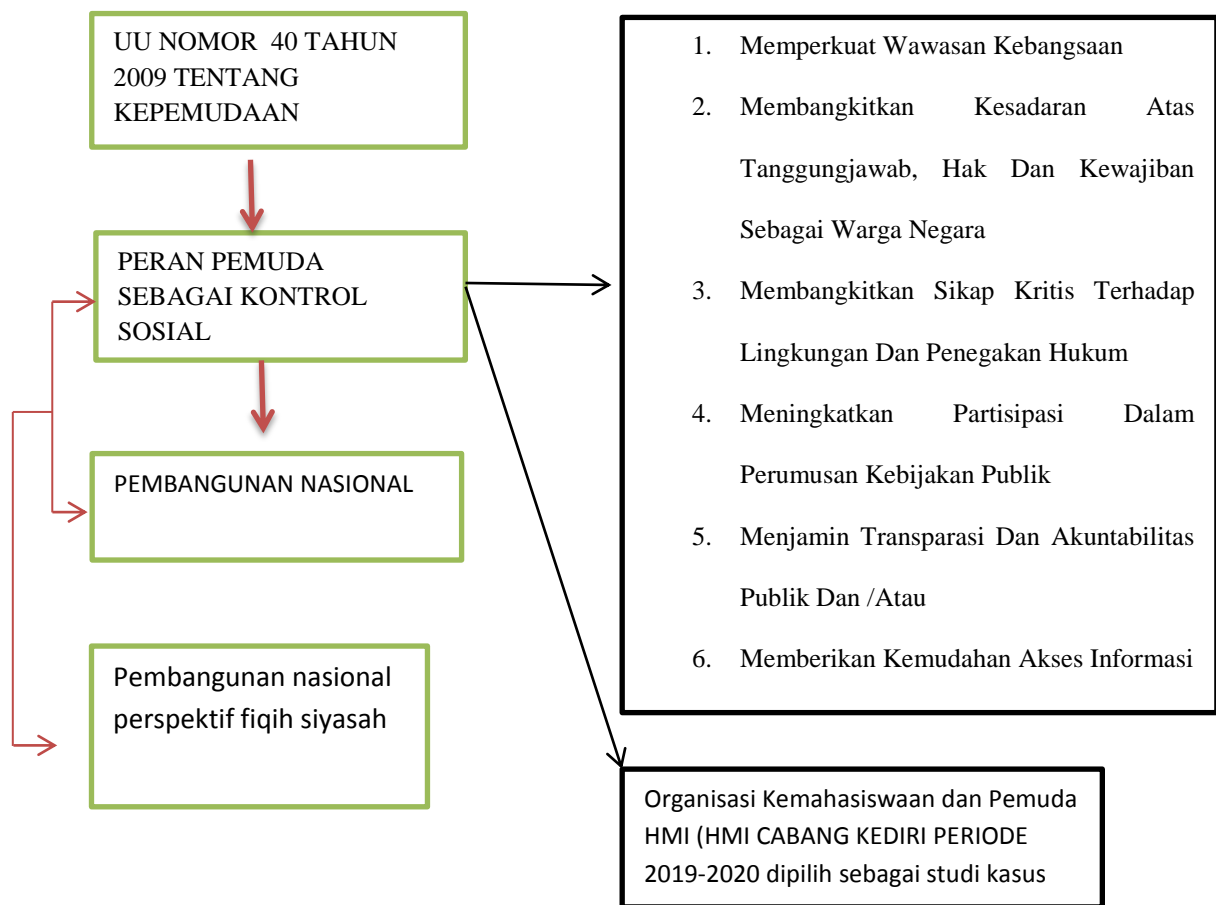
<sup>22</sup> Putra Septian Pratama “*Budaya organisasi himpunan mahasiswa islam dan unit kegiatan mahasiswa islam di Fisip USU*” (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2018) Hlm. 160-161



kader HMI memiliki bekal secara kompresif mengenai dunia politik.<sup>23</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada fokus penelitian yang dilakukan.

## H. KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN



<sup>23</sup> Eka Febriyanti, "Peran Himpunan Mahasiswa Islam Dalam Peningkatan Kesadaran Berpolitik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019) Hlm. 54